

BAB VI

PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

6.1. Kewilayahan Kabupaten Tasikmalaya

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara keanekaragaman (pendapat, kepercayaan, hubungan dan sebagainya) memerlukan suatu perekat agar bangsa yang bersangkutan dapat bersatu mempertahankan keutuhan bangsa dan negaranya.

Suatu bangsa dalam menyelenggarakan kehidupannya tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya, yang didasarkan atas hubungan timbal balik antara fisiologi bangsa, idiologi, aspirasi dan cita-cita yang dihadapkan pada kondisi sosial masyarakat budaya dan tradisi keadaan alam dan kondisi wilayah serta pengalaman sejarah. Upaya pemerintah dan rakyat menyelenggarakan kehidupannya, memerlukan suatu konsepsi yang berupa wawasan nasional yang dimaksudkan untuk menjamin kelngsungan hidup, keutuhan hidup serta jati diri bangsa.

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengagendakan program prioritas yang terdapat dalam NAWA CITA yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam memperkuat negara kesatuan dan sejalan dengan Tema RKP Pemerintah yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur untuk meletakkan fondasi pembangunan yang berkualitas. Perpaduan antara RKP dan Nawa Cita merupakan keinginan pemerintah untuk membangun fondasi infrastruktur yang kuat berbasis kewilayahan untuk menopang pembangunan nasional.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah, pembangunan berbasis kewilayahan perlu mendapat perhatian khusus dalam penyusunan RKP Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016, mengingat keterbatasan anggaran daerah untuk membangun infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan wilayah untuk setiap tahunnya.

Luasnya wilayah dan jumlah penduduk khususnya di Kabupaten Tasikmalaya menjadi tantangan tersendiri bagi pembangunan infrastruktur, hampir tidak mungkin untuk melakukan pembangunan

tersebut apabila anggarannya oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, oleh karena itu perlu pendekatan berbasis pembangunan kewilayahan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan khususnya di Provinsi Jawa Barat.

Selain permasalahan infrastruktur juga permasalahan ekonomi yang masih dirasakan adalah besarnya kesenjangan pembangunan antar wilayah. Kesenjangan pembangunan antar wilayah di Jawa Barat tampak dalam beberapa dimensi; pertama, kegiatan ekonomi di Provinsi Jawa Barat masih terkonsentrasi di wilayah Kabupaten/kota di pusat pertumbuhan ekonomi diantaranya Kota Bandung, Bekasi, Depok dan daerah lainnya, hal ini disamping erat kaitannya dengan kualitas infrastruktur dan keterkaitannya dengan pasar global juga berhubungan dengan iklim investasi, adapun kesenjangan antar wilayah di Provinsi Jawa Barat diantaranya sebagai berikut :

6.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Tasikmalaya berperan penting dalam perekonomian Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya tergolong rendah karena dibawah pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan nasional. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya dari tahun 2011-2013 rata-rata sebesar 4,32%, sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,18% dan Provinsi Jawa Barat sebesar 6,28%.

Tabel 6.1.
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2011-2014

Indikator	2011	2012	2013
PDRB Kab. Tasikmalaya	57,551.49	59,954.03	62,629.15
LPE Kab. Tasikmalaya	4.32	4.17	4.46
PDRB Prov. Jabar	343,193.56	364,752.40	386,838.84
LPE Prov. Jabar	6.51	6.28	6.06
PDB Nasional	2,464,566.10	2,618,932.00	2,769,053.00
LPE Nasional	6.49	6.26	5.73

Sumber : BPS Pusat, Jawa Barat, Kab. Tasikmalaya, berbagai tahun

Sementara itu dengan menggunakan data Pusdalisbang BAPPEDA Provinsi Jawa Barat seperti tersaji pada tabel 6.1. (data tahun 2012 merupakan angka sementara), diketahui bahwa sebaran kabupaten/kota berdasarkan kelompok besaran laju pertumbuhan ekonomi (LPE) termasuk migas dan tanpa migas terbagi menjadi empat kelompok. Kelompok pertama adalah wilayah yang memiliki LPE (termasuk migas) kurang dari atau sama dengan lima persen, yaitu Sukabumi, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang dan Subang. Dari sebagian besar wilayah-wilayah tersebut, terdapat kesamaan potensi sektoralnya yaitu sektor pertanian. Terdapat tiga wilayah yang memiliki sektor migas yaitu Sukabumi, Majalengka, dan Subang. Apabila sektor migas tersebut dikeluarkan (tanpa migas), maka wilayah-wilayah yang masuk dalam LPE kelompok pertama ini relatif sama.

Adapun wilayah-wilayah yang masuk dalam kelompok kedua yaitu rentang LPE 5,01 - 6,00 persen adalah sebanyak sembilan kabupaten/kota. Di antara wilayah-wilayah tersebut, terdapat beberapa kesamaan potensi sektoralnya dimana Bogor, Indramayu, Karawang, dan Kota Cimahi didominasi oleh sektor industri pengolahan. Wilayah kota lebih didominasi oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran seperti Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar. Cianjur merupakan wilayah dengan potensi sektor pertanian. Hanya kabupaten Indramayu dan Karawang yang memiliki sektor migas. Apabila sektor migas tersebut dikeluarkan, maka Karawang masih tetap masuk pada rentang LPE 5,01 - 6,00 persen (kelompok kedua), sedangkan Indramayu masuk pada kelompok ketiga (6,01-7,00 persen).

Wilayah pada rentang LPE 6,01 - 7,00 persen (kelompok ketiga) adalah enam kabupaten/kota. Kota Bogor lebih didominasi oleh peranan sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Sedangkan lima wilayah lainnya seperti Bandung, Purwakarta, Bekasi, Bandung Barat dan Kota Bekasi, lebih didominasi oleh sektor industri pengolahan. Pada kelompok ini, sektor migas hanya terdapat di Bandung dan Bekasi. Apabila sektor

migas tersebut dikeluarkan, maka Bandung dan Bekasi masih tetap masuk pada rentang LPE 6,01–7,00 persen (kelompok ketiga).

Kelompok keempat merupakan kabupaten/kota dengan LPE di atas tujuh persen dimana yang terdiri dari Kota Bandung dan Kota Depok. Potensi sektoral kedua kota pada kelompok ini umumnya adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran.

Tabel 6.2
Pengelompokan LPE Kabupaten/Kota
di Jawa Barat Tahun 2012

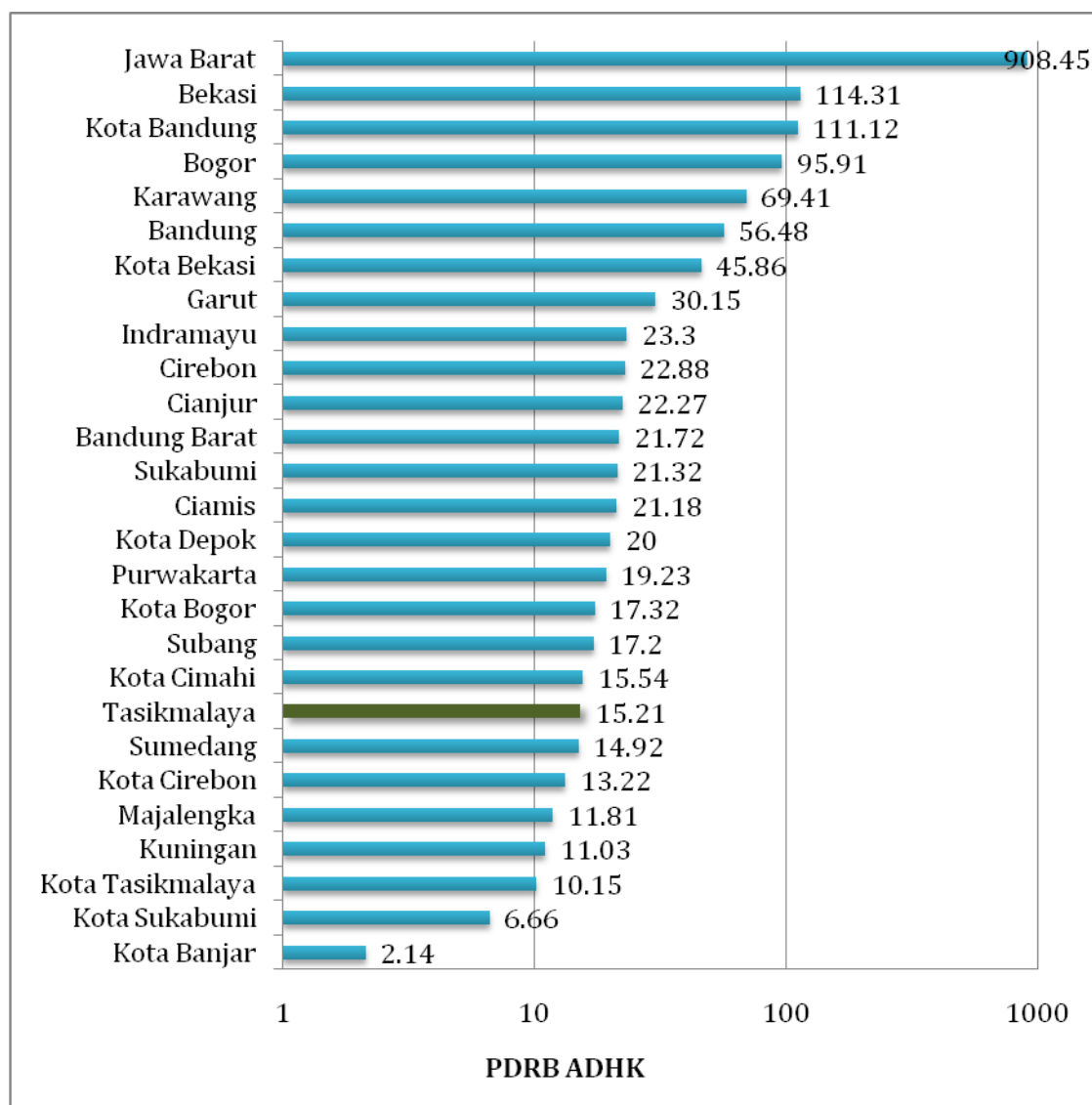
LPE ¹⁾	Termasuk Migas	Tanpa Migas
≤ 5,00	Sukabumi, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, dan Subang	Sukabumi, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, dan Subang
5,01- 6,00	Bogor, Cianjur, Indramayu, Karawang, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, Banjar	Bogor, Cianjur, Karawang, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar
6,01-7,00	Bandung, Purwakarta, Bekasi, dan Bandung Barat, Kota Bogor, dan Kota Bekasi Jawa Barat (6,21 persen)	Bandung, Indramayu, Purwakarta, Bekasi, Bandung Barat, Kota Bogor, dan Bekasi Jawa Barat (6,53 persen)
> 7,00	Kota Bandung, dan Depok	Kota Bandung, dan Depok

Sumber : PUSDALISBANG Jabar, 2013

6.1.2. Struktur Ekonomi

Gambar 6.1. menunjukkan kabupaten/kota dengan PDRB atas dasar harga berlaku tanpa migas terbesar di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2012 adalah Kabupaten Bekasi sebesar Rp114,31 triliun, dan terkecil adalah Kota Banjar sebesar Rp2,14 triliun. Kabupaten Tasikmalaya berada di urutan ke-19 dari 26 kabupaten dan kota dengan nilai Rp15,21 triliun dan berperan 1,83% terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat. Walaupun terjadi kenaikan dibanding tahun 2011 yang mencapai Rp13,93 triliun, tetapi posisi ranking tidak berubah.

Gambar : 6.1.
PDRB Kabupaten/Kota se- Jawa Barat



Sumber : Pusdalibang Jabar, 2013

Aktivitas perekonomian yang berperan dalam suatu wilayah dapat diketahui dengan membandingkan penciptaan nilai tambah aktivitas perekonomian tersebut dengan nilai tambah total yang diciptakan oleh wilayah sehingga dapat teridentifikasi struktur perekonomian wilayah. Struktur perekonomian menunjukkan sektor-sektor perekonomian yang signifikan berkontribusi terhadap perekonomian wilayah. Gambaran struktur ekonomi dihitung menggunakan PDRB atas dasar harga berlaku.

Tabel 6.3. memperlihatkan peranan NTB sektoral masing-masing kabupaten/kota dan Jawa Barat terhadap masing-masing total PDRB

ADHB-nya (termasuk migas). Sektor yang paling dominan di Jawa Barat adalah sektor industri pengolahan (35,79 persen), kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran (23,90 persen), dan sektor pertanian (11,52 persen), sedangkan untuk sektorsektor lainnya (sektor pertambangan dan penggalian; sektor listrik, gas, dan air bersih; sektor bangunan; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; dan sektor jasa jasa) masing-masing hanya memiliki kontribusi kurang dari sepuluh persen. Secara kumulatif, sektor-sektor lainnya tersebut memberikan kontribusi sebesar 28,79 persen terhadap total PDRB Jawa Barat.

Kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa tiga sektor andalan dalam perekonomian Jawa Barat adalah industri pengolahan; perdagangan, hotel, dan restoran; serta pertanian. Apabila ditinjau berdasarkan peranan NTB sektoral masing-masing kabupaten/kota (termasuk migas), terlihat bahwa sebagian besar wilayah kabupaten masih didominasi oleh sektor pertanian sebagai sektor andalan perekonomiannya. Sebanyak 10 dari 17 kabupaten di Jawa Barat mengandalkan sektor pertanian dalam menggerakkan perekonomiannya yaitu Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, dan Subang. Sementara itu, kabupaten lainnya seperti Bogor, Bandung, Indramayu, Purwakarta, Karawang, Bekasi, dan Bandung Barat serta dua wilayah kota yaitu Kota Bekasi dan Kota Cimahi mengandalkan sektor industri pengolahan. Adapun wilayah kota lainnya seperti Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Depok, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar lebih mengandalkan sektor perdagangan, hotel, dan restoran dalam menggerakkan perekonomiannya.

Kabupaten Tasikmalaya menempati urutan ke-2 terbesar dalam peranan NTB sektor pertanian, urutan ke-21 untuk sektor industri pengolahan, urutan ke-11 untuk sektor perdagangan, hotel, dan restoran, dan urutan ke-18 untuk sektor lainnya.

Tabel 6.3.
Peranan Nilai Tambah Bruto (NTB) Sektoral (Termasuk Migas)
Terhadap PDRB Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2012 (Persen)

No.	Kabupaten/ Kota	Peranan NTB Sektoral (Termasuk Migas)				Jumlah
		Pertanian	Industri Pengolahan	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	Lainnya	
1	Bogor	3,74	59,59	19,34	17,33	100,00
2	Sukabumi	27,86	16,92	26,07	29,15	100,00
3	Cianjur	37,06	3,88	27,41	31,65	100,00
4	Bandung	7,92	57,67	18,29	16,12	100,00
5	Garut	44,21	7,62	26,78	21,39	100,00
6	Tasikmalaya	39,62	8,49	27,47	24,42	100,00
7	Ciamis	28,82	6,99	27,32	36,86	100,00
8	Kuningan	26,80	2,01	22,07	49,12	100,00
9	Cirebon	28,63	13,68	21,12	36,56	100,00
10	Majalengka	32,53	15,53	18,87	33,07	100,00
11	Sumedang	28,36	22,17	27,63	21,84	100,00
12	Indramayu	13,86	38,62	15,58	31,94	100,00
13	Subang	35,18	13,45	21,44	29,93	100,00
14	Purwakarta	9,10	44,27	27,64	18,99	100,00
15	Karawang	8,38	51,92	18,12	21,58	100,00
16	Bekasi	2,29	76,58	9,87	11,27	100,00
17	Bandung Barat	11,87	41,76	21,22	25,15	100,00
18	Kota Bogor	0,17	27,51	36,23	36,08	100,00
19	Kota Sukabumi	3,60	5,20	48,49	42,71	100,00
20	Kota Bandung	0,21	22,55	41,67	35,57	100,00
21	Kota Cirebon	0,31	21,91	35,21	42,57	100,00
22	Kota Bekasi	0,80	42,23	31,14	25,82	100,00
23	Kota Depok	1,96	35,30	37,38	25,36	100,00
24	Kota Cimahi	0,16	57,90	20,60	21,34	100,00
25	Kota Tasikmalaya	6,05	14,67	32,90	46,39	100,00
26	Kota Banjar	16,07	12,23	34,90	36,80	100,00
	Jawa Barat	11,52	35,79	23,90	28,79	100,00

Sumber : Pusdalisbang Jabar, 2013

Sementara itu menunjukkan apabila sektor migas dikeluarkan (tanpa migas), terlihat sektor yang paling dominan di Jawa Barat masih tetap sektor industri pengolahan dengan%tase lebih kecil yaitu sebesar 34,68% (2.13.), diikuti kemudian oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran (24,91%), dan sektor pertanian (12,01%). Adapun untuk sektor-

sektor lainnya, masing-masing hanya memiliki kontribusi kurang dari sepuluh%, sehingga secara kumulatif, sektor-sektor lainnya tersebut memberikan kontribusi sebesar 28,40%. Apabila dirinci, maka sektor andalan di masing-masing kabupaten/kota bila sektor migas dikeluarkan (tanpa migas) adalah relatif sama dengan sektor andalan bila sektor migas diperhitungkan (termasuk migas) kecuali Kabupaten Indramayu yang lebih mengandalkan sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Perankingan dengan peranan NTB Sektoral tanpa migas menunjukkan Kabupaten Tasikmalaya menempati urutan ke-2 terbesar dalam peranan NTB sektor pertanian, urutan ke-20 untuk sektor industri pengolahan, urutan ke-12 untuk sektor perdagangan, hotel, dan restoran, dan urutan ke-6 untuk sektor lainnya.

Tabel 6.4.
Peranan Nilai Tambah Bruto (NTB) Sektoral (Tanpa Migas)
Terhadap PDRB Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2012 (Persen)

No.	Kabupaten/ Kota	Peranan NTB Sektoral (Termasuk Migas)				Jumlah
		Pertanian	Industri Pengolahan	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	Lainnya	
1	Bogor	3,74	59,59	19,34	17,33	100,00
2	Sukabumi	28,23	17,15	26,42	28,20	100,00
3	Cianjur	37,06	3,88	27,41	31,65	100,00
4	Bandung	8,00	58,27	18,48	15,25	100,00
5	Garut	44,21	7,62	26,78	21,39	100,00
6	Tasikmalaya	39,62	8,49	27,47	24,42	100,00
7	Ciamis	28,82	6,99	27,32	36,86	100,00
8	Kuningan	26,80	2,01	22,07	49,12	100,00
9	Cirebon	28,63	13,68	21,12	36,56	100,00
10	Majalengka	32,97	15,73	19,13	32,17	100,00
11	Sumedang	28,36	22,17	27,63	21,84	100,00
12	Indramayu	34,50	4,22	38,78	22,50	100,00
13	Subang	37,97	14,52	23,14	24,37	100,00
14	Purwakarta	9,10	44,27	27,64	18,99	100,00
15	Karawang	8,61	53,27	18,62	19,49	100,00
16	Bekasi	2,33	78,02	10,05	9,59	100,00
17	Bandung Barat	11,87	41,76	21,22	25,15	100,00
18	Kota Bogor	0,17	27,51	36,23	36,08	100,00
19	Kota	3,60	5,20	48,49	42,71	100,00

No.	Kabupaten/ Kota	Peranan NTB Sektoral (Termasuk Migas)				Jumlah
		Pertanian	Industri Pengolahan	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	Lainnya	
	Sukabumi					
20	Kota Bandung	0,21	22,55	41,67	35,57	100,00
21	Kota Cirebon	0,31	21,91	35,21	42,57	100,00
22	Kota Bekasi	0,80	42,23	31,14	25,82	100,00
23	Kota Depok	1,96	35,30	37,38	25,36	100,00
24	Kota Cimahi	0,16	57,90	20,60	21,34	100,00
25	Kota Tasikmalaya	6,05	14,67	32,90	46,39	100,00
26	Kota Banjar	16,07	12,23	34,90	36,80	100,00
	Jawa Barat	12,01	34,68	24,91	28,40	100,00

Sumber : Pusdalisbang Jabar, 2013

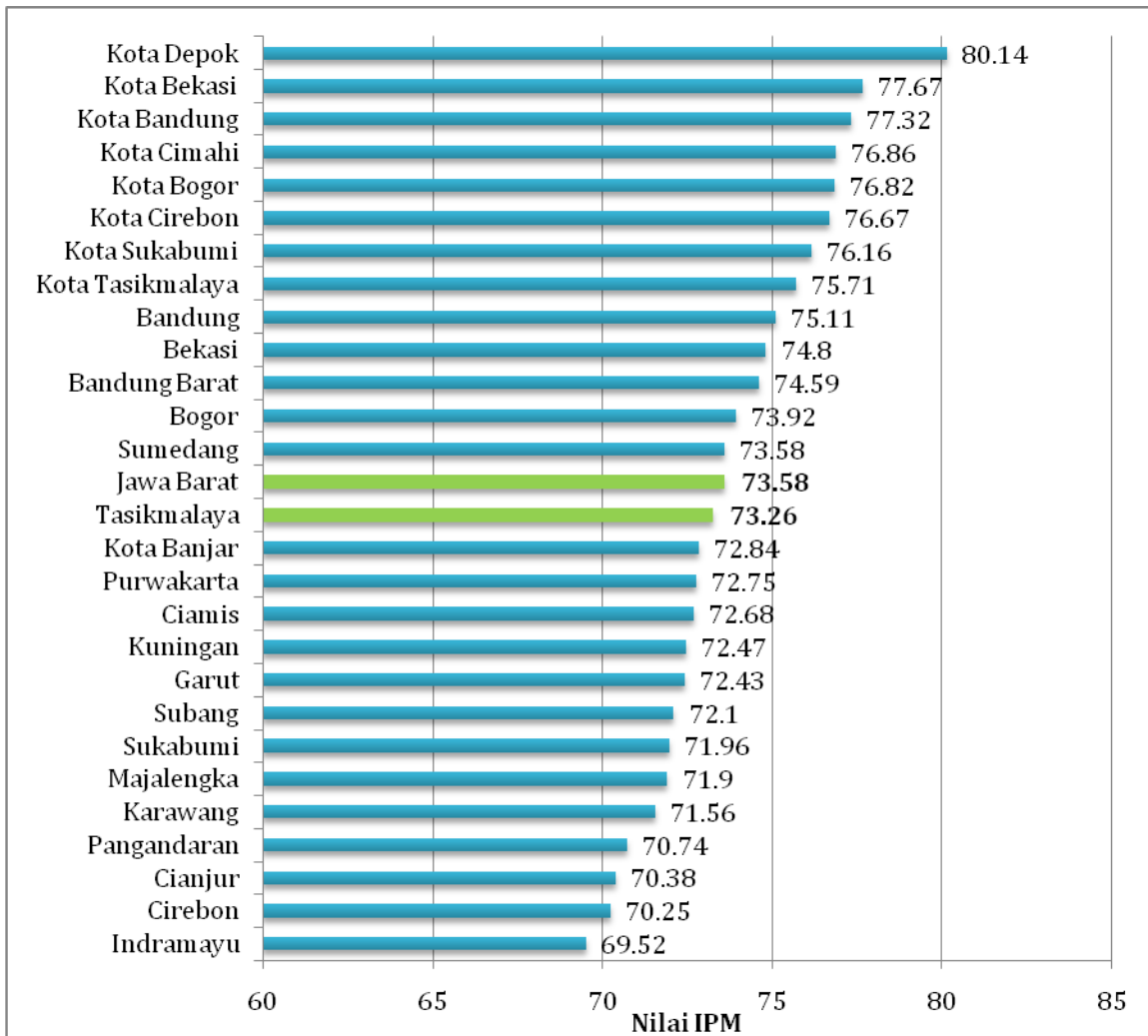
Tinjauan struktur ekonomi dari sisi penawaran di Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan sub sektor bank tumbuh tertinggi pada tahun 2011 sebesar 9.68% dan 8.79 pada tahun 2013. Sementara pada tahun 2012 sub sektor komunikasi tumbuh tertinggi sebesar 26.31%. Sub sektor ini tumbuh dan turun sangat signifikan karena pada tahun 2011 hanya tumbuh 0.59% dan turun menjadi hanya 6.45% pada tahun 2013. Demikian halnya dengan sub sektor hotel yang tumbuh signifikan pada tahun 2012 sebesar 9.7%, sementara pada tahun 2011 hanya tumbuh 0.53% dan menjadi sub sektor yang tumbuh terendah. Pada tahun 2012 sub sektor pengangkutan tumbuh terendah dan drastis sebesar -6.16%, karena pada tahun 2011 masih tumbuh positif sebesar 6.95%. Sektor kehutanan tumbuh negatif selama tahun 2012 dan menjadi sub sektor yang tumbuh terendah pada tahun 2013.

6.1.3 Disparitas IPM Kabupaten/Kota (Lintas Daerah)

IPM sebagai indikator makro pembangunan selain memiliki makna yang positif untuk mengukur seberapa besar kinerja pembangunan daerah, juga memiliki makna penting untuk melihat disparitas wilayah. Penelaahan komparatif atas disparitas dapat dilihat dengan perbandingan antar kabupaten/kota di Jawa Barat, maupun dengan kabupaten/kota secara nasional. Untuk melakukan komparasi tersebut, maka data IPM yang digunakan tidak dapat menggunakan data yang bersumber dari BPS

Kabupaten Tasikmalaya, akan tetapi menggunakan data BPS Pusat. Data IPM ini tertuang dalam *Laporan Pembangunan Manusia Indonesia* yang secara khusus dipublikasi oleh BPS Pusat. Berikut disajikan komparasi IPM Kabupaten Tasikmalaya dengan tingkat nasional dan provinsi Jawa Barat.

Gambar 6.2.
Perbandingan IPM di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013

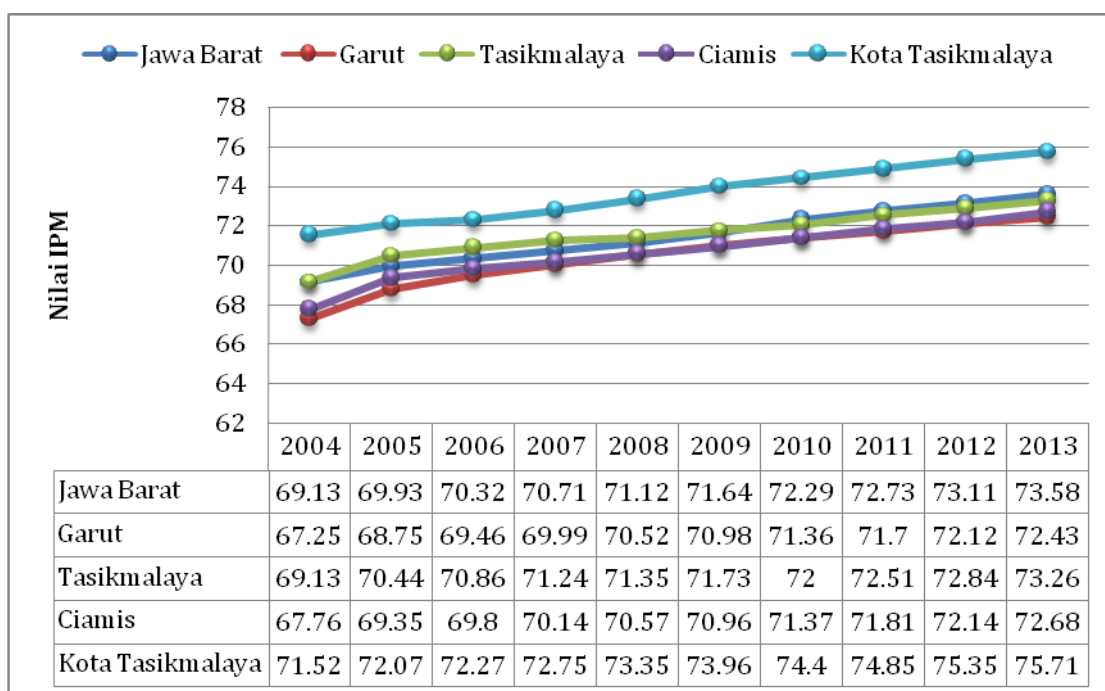


Sumber : BPS Pusat, 2014

Kendati telah menunjukkan kinerja yang positif, namun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tasikmalaya masih harus ditingkatkan lebih lanjut, karena jika dibandingkan dengan capaian IPM kabupaten/kota di dalam lingkup Provinsi Jawa Barat capaian IPM Kabupaten Tasikmalaya masih berada di bawah IPM Provinsi Jawa Barat. Apabila dibandingkan dengan pencapaian IPM Kabupaten Garut dan

Ciamis IPM Kabupaten Tasikmalaya masih relatif lebih baik, akan tetapi masih dibawah IPM Kota Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2013 menduduki ranking 14 pencapaian IPM di Provinsi Jawa Barat.

Gambar 6.3.
Capaian IPM Tahun 2004-2013



Sumber : BPS Pusat, 2014 (diolah)

6.1.4. Kemiskinan dan Kasejahteraan Sosial

Gambaran kondisi kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya menggunakan data BPS yang menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) sebagai ukuran. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Tabel 6.5. menunjukkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tasikmalaya pada September 2013 sejumlah 199.300 jiwa telah berkurang dibanding September 2012 sejumlah 201.500 jiwa. Pada

September 2012, jumlah ini menduduki peringkat 17 terkecil dibanding 26 Kota/Kabupaten sekitar di Jawa Barat. Angka ini lebih besar dibanding daerah lain yang berbatasan yaitu Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Majalengka, dan lebih kecil dibanding Kabupaten Garut. Namun demikian pemeringkatan berdasarkan %tase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk, Kabupaten Tasikmalaya menduduki peringkat 10 di Jawa Barat dengan nilai 11.57% atau turun dibanding September 2012 sebesar 11.76%. Angka ini jauh lebih baik dibanding Kota Tasikmalaya dengan persentase penduduk miskin 17.9% terhadap jumlah penduduk dan menduduki peringkat 1 di Jawa Barat.

Tabel 6.5.
Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman dan
Keparahan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
Periode September 2012 s.d. September 2013

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000)		Persentase Penduduk Miskin (%)		Indeks Kedalaman Kemiskinan		Indeks Keparahan Kemiskinan		Garis Kemiskinan (Rp/Kap/bulan)	
		Sep-12	Sep-13	Sep-12	Sep-13	Sep-12	Sep-13	Sep-12	Sep-13	Sep-12	Sep-13
1	Bogor	451	499.1	8.83	9.54	1.27	1.39	0.29	0.33	252,542	271,970
2	Sukabumi	234.6	222.8	9.79	9.24	1.33	1.5	0.29	0.38	227,741	240,188
3	Cianjur	292.2	267.9	13.18	12.02	2.01	1.7	0.48	0.39	250,032	264,580
4	Bandung	279.5	271.7	8.33	7.94	1.37	1.13	0.37	0.25	241,947	256,733
5	Garut	315.8	320.9	12.72	12.79	1.79	1.73	0.4	0.41	213,707	226,308
6	Tasikmalaya	201.5	199.3	11.76	11.57	2.17	1.47	0.62	0.28	222,594	237,114
7	Ciamis	147.8	133	9.63	8.62	1.76	1.28	0.46	0.29	251,624	270,515
8	Kuningan	142.3	139.4	13.7	13.34	1.91	2.09	0.48	0.47	245,476	261,858
9	Cirebon	311.3	307.2	14.96	14.65	2.15	2.09	0.51	0.46	281,027	300,990
10	Majalengka	168.6	164.9	14.46	14.07	2.52	2.24	0.69	0.55	326,962	353,727
11	Sumedang	132.9	127.4	11.87	11.31	1.79	1.48	0.44	0.32	249,315	260,160
12	Indramayu	257.3	251.1	15.44	14.99	2.12	2.02	0.44	0.47	325,787	350,455
13	Subang	185.4	185.4	12.49	12.35	1.51	1.69	0.3	0.41	257,543	272,854
14	Purwakarta	85	83.6	9.57	9.28	1.57	1.41	0.39	0.32	251,132	271,270
15	Karawang	245.1	238.6	11.11	10.69	1.71	1.55	0.39	0.36	310,751	335,273
16	Bekasi	153.1	157.7	5.25	5.2	0.88	0.77	0.24	0.18	328,244	361,510
17	Bandung Barat	209.9	206	13.35	12.92	1.82	2.29	0.38	0.64	241,892	256,789
18	Kota Bogor	84.8	83.3	8.48	8.19	1.26	1.13	0.3	0.21	331,955	360,518
19	Kota Sukabumi	26	25.2	8.42	8.05	0.98	1.17	0.18	0.25	370,633	411,523
20	Kota Bandung	111.4	117.7	4.55	4.78	0.59	0.48	0.12	0.08	314,721	340,355
21	Kota Cirebon	33.2	31.9	11.1	10.54	1.65	1.11	0.38	0.2	307,812	334,439

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000)		Persentase Penduduk Miskin (%)		Indeks Kedalaman Kemiskinan		Indeks Keparahan Kemiskinan		Garis Kemiskinan (Rp/Kap/bulan)	
		Sep-12	Sep-13	Sep-12	Sep-13	Sep-12	Sep-13	Sep-12	Sep-13	Sep-12	Sep-13
22	Kota Bekasi	139.8	137.8	5.56	5.33	0.98	0.73	0.24	0.16	403,033	449,026
23	Kota Depok	47	45.9	2.46	2.32	0.21	0.26	0.04	0.06	397,687	443,302
24	Kota Cimahi	37.7	32.3	6.68	5.63	1.14	1.09	0.32	0.29	318,871	347,234
25	Kota Tasikmalaya	123	112.2	18.94	17.19	3.79	2.57	1.18	0.63	317,037	337,841
26	Kota Banjar	13.9	12.8	7.79	7.11	0.8	1.33	0.13	0.31	234,687	250,311
Jawa Barat		4430.2	4375.2	9.88	9.61	1.62	1.65	0.42	0.44	242,104	276,825

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2014

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

BPS mendefinisikan Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya pada September 2012 sebesar 2.17 turun pada September 2013 menjadi 1.47. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

BPS mendefinisikan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Ukuran ini memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (*poverty gap*) rendah, sementara kelompok

penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin. Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya pada September 2012 sebesar 0.62 turun pada September 2013 menjadi 0.28.

BPS mendefinisikan Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Garis kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya pada Kabupaten Tasikmalaya pada September 2012 sebesar Rp222.494,00 kemudian meningkat menjadi Rp237.114,00 pada September 2013.

6.1.5. Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan, yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. Rincian angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi. Secara umum, kegunaan indikator ini adalah untuk mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah, dan menunjukkan besaran relatif dan pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK

diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja.

Pada Agustus 2014, nilai TPAK di Provinsi Jawa Barat menurut kabupaten/kota yang tertinggi terjadi di Kabupaten Majalengka dengan TPAK sebesar 71,42, diikuti oleh Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Bandung masing-masing sebesar 67,60 dan 66,16. Nilai TPAK yang tinggi mencerminkan tingginya partisipasi penduduk usia kerja yang terlibat dalam aktifitas ekonomi di ketiga wilayah tersebut. Namun demikian untuk Kabupaten Tasikmalaya, TPAK laki-laki masih jauh lebih tinggi dibanding perempuan. Sementara itu, kabupaten/kota dengan nilai TPAK terendah adalah Kabupaten Bandung Barat dengan%tase sebesar 55,71, diikuti oleh Kabupaten Garut dan Kabupaten Cirebon, masing-masing 59,05 dan 59,55. Nilai TPAK menurut kabupaten/kota dapat disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 6.6
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota Periode Agustus 2013 s.d. Agustus 2014 (%)

No.	Kab/Kota	Agustus 2013			Agustus 2014		
		Laki-laki	Perempuan	L + P	Laki-laki	Perempuan	L + P
1	Kab Majalengka	83.5	52.96	68.08	87.49	55.66	71.42
2	Kab Tasikmalaya	84.38	51.98	67.87	83.96	51.86	67.60
3	Kab Bandung	86.16	43.54	65.13	85.90	45.91	66.16
4	Kab Ciamis	86.56	46.84	66.27	80.96	50.55	65.43
5	Kab Cianjur	86.45	43.45	65.66	85.75	43.65	65.38
6	Kab Sumedang	80.85	41.75	61.08	80.86	49.95	65.23
7	Kota Cirebon	82.2	45.18	63.54	81.72	48.43	64.94
8	Kab Subang	83.69	42.58	63.24	84.52	43.52	64.11
9	Kab Sukabumi	83.54	40.06	62.07	84.00	42.92	63.71
10	Kota Banjar	79.98	39.3	59.19	83.15	44.87	63.59
11	Kota Depok	84.37	40.07	62.29	83.76	42.81	63.34
12	Kota Bandung*	82.07	44.02	63.19	77.90	47.97	63.04
13	Jawa Barat	83.44	41.74	62.82	82.82	42.30	62.77
14	Kab Purwakarta	83.91	39.62	62.16	83.86	40.41	62.50
15	Kota Cimahi	80.31	42.18	61.32	79.75	44.84	62.36
16	Kota Bekasi	79.74	42.08	61	80.77	43.49	62.21

No.	Kab/Kota	Agustus 2013			Agustus 2014		
		Laki-laki	Perempuan	L + P	Laki-laki	Perempuan	L + P
17	Kab Karawang	84.19	35.56	60.54	81.58	41.68	62.16
18	Kab Bogor	85.17	40.99	63.60	83.98	38.69	61.86
19	Kab Bekasi	87.43	37.37	62.87	86.99	34.63	61.28
20	Kab Indramayu	81.49	45.64	64.11	79.63	41.73	61.25
21	Kota Tasikmalaya	82.46	48.31	65.41	81.47	39.83	60.67
22	Kab Kuningan	81.22	45.16	63.12	81.11	39.50	60.21
23	Kota Bogor	80.57	38.41	59.74	82.77	36.61	59.96
24	Kota Sukabumi	80.17	36.52	58.59	77.40	41.89	59.83
25	Kab Cirebon	79.36	38.06	59.2	81.26	36.80	59.55
26	Kab Garut	78.08	39.42	58.82	79.20	38.79	59.05
27	Kab Bandung Barat	85.4	31.76	58.98	81.74	28.93	55.71

Sumber : Indikator pasar Tenaga Kerja Jawa Barat, BPS, 2014

Rasio penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk (*Employment to Population Ratio-EPR*) didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia kerja suatu negara yang berstatus bekerja terhadap penduduk usia kerja. Rasio yang tinggi berarti sebagian besar penduduk suatu negara adalah bekerja, sementara rasio rendah berarti bahwa sebagian besar penduduk tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan pasar, karena mereka menganggur atau (lebih mungkin) tidak termasuk dalam angkatan kerja, yang sering disebut sebagai Bukan Angkatan Kerja (BAK).

Rasio ini memberikan informasi tentang kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja, karena di banyak negara indikator ini menghasilkan analisis yang lebih mendalam dibandingkan dengan tingkat pengangguran. Meskipun secara keseluruhan rasio tinggi biasanya dianggap sebagai positif, indikator ini saja tidak cukup untuk menilai tingkat pekerjaan yang layak atau tingkat defisit pekerjaan yang layak. Indikator tambahan diperlukan untuk menilai isu-isu seperti upah/gaji, jam kerja, lapangan kerja sektor informal, setengah pengangguran, dan kondisi kerja. Bahkan, nilai rasio ini bisa tinggi untuk alasan yang tidak selalu positif misalnya, pilihan pendidikan yang terbatas sehingga kaum muda mengambil pekerjaan yang tersedia daripada tinggal di sekolah

untuk membangun modal manusia mereka (memilih bekerja demi melanjutkan sekolah/membiayai sekolah). Untuk alasan ini, sangat disarankan bahwa indikator ini harus ditinjau ulang secara kolektif dalam setiap evaluasi kebijakan tenaga kerja di suatu negara/wilayah.

Secara umum di Jawa Barat, BPS memaparkan bahwa pola EPR berdasarkan kelompok umur ternyata mirip dengan pola TPAK. Hal ini menunjukkan dominasi jumlah penduduk bekerja pada komponen angkatan kerja. Artinya, komponen pengangguran pada angkatan kerja relatif kecil. Puncak EPR terjadi pada kelompok umur 40-44 tahun. Antara Agustus 2013 dan Agustus 2014 grafik EPR berhimpitan hingga kelompok umur 45-49, dan mulai merenggang pada kelompok umur 60-64, dengan jarak terbesar terjadi pada kelompok umur 75-79.

Kabupaten/kota dengan EPR tertinggi pada Agustus 2014 adalah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis. Sementara itu, kabupaten/kota dengan EPR terendah pada periode yang sama adalah Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cirebon, dan Kota Sukabumi.

Tabel 6.7.
Employment to Population Ratio Provinsi Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota Periode Agustus 2013 s.d. Agustus 2014 (%)

No.	Kab/Kota	Agustus 2013			Agustus 2014		
		Laki-laki	Perempuan	L + P	Laki-laki	Perempuan	L + P
1	Kab Majalengka	76.90	49.53	63.08	83.60	53.15	68.23
2	Kab Tasikmalaya	78.25	49.35	63.52	78.30	48.12	62.92
3	Kab Ciamis	80.71	44.87	62.39	76.31	48.71	62.21
4	Kab Bandung	77.85	38.72	58.54	79.33	41.28	60.55
5	Kab Sumedang	75.47	39.25	57.16	75.15	45.83	60.33
6	Kab Subang	77.85	39.15	58.60	79.66	39.74	59.79
7	Kota Banjar	74.16	36.71	55.02	75.09	43.40	58.89
8	Kab Sukabumi	75.83	34.92	55.63	76.66	40.01	58.56
9	Kota Depok	77.35	37.53	57.50	77.16	38.72	58.00
10	Kota Bandung	73.04	39.21	56.26	71.11	44.64	57.97
11	Kota Cirebon	74.81	41.07	57.81	71.63	44.16	57.78
12	Kab Purwakarta	75.26	36.63	56.28	77.32	37.22	57.61
13	Jawa Barat	76.16	37.56	57.07	76.13	38.41	57.47

No.	Kab/Kota	Agustus 2013			Agustus 2014		
		Laki-laki	Perempuan	L + P	Laki-laki	Perempuan	L + P
14	Kota Tasikmalaya	76.88	45.36	61.14	77.79	36.99	57.41
15	Kab Bogor	78.59	37.63	58.59	76.83	36.48	57.12
16	Kab Bekasi	82.05	33.78	58.37	82.35	30.95	57.12
17	Kota Bekasi	73.40	36.83	55.21	74.31	38.31	56.39
18	Kota Cimahi	68.84	39.67	54.32	71.83	40.77	56.36
19	Kab Indramayu	74.13	40.73	57.94	73.14	38.51	56.34
20	Kab Kuningan	75.28	40.72	57.93	75.46	36.86	56.07
21	Kab Cianjur	75.57	35.82	56.35	73.78	36.32	55.66
22	Kab Karawang	75.99	32.01	54.60	73.72	35.79	55.26
23	Kab Garut	71.96	35.98	54.03	73.11	35.79	54.50
24	Kota Bogor	72.92	34.38	53.89	75.67	32.37	54.27
25	Kota Sukabumi	71.15	32.49	52.04	68.66	36.73	52.86
26	Kab Cirebon	70.00	29.83	50.39	71.72	30.56	51.62
27	Kab Bandung Barat	78.72	27.22	53.35	77.11	24.49	51.17

Sumber : Indikator pasar Tenaga Kerja Jawa Barat, BPS, 2014

Pekerja rentan dapat diartikan sebagai setengah pengangguran yang pada umumnya mempunyai keterampilan kerja yang rendah dengan jumlah jam kerja kurang dari jam kerja normal. Kesenjangan antara kesempatan kerja dengan angkatan kerja biasanya mendorong tenaga kerja rentan akan untuk memperoleh kesejahteraan yang lebih baik dengan mencari kesempatan kerja di luar negeri yang kemudian mengirimkan penghasilannya kepada keluarga yang ditinggalkan. Konsep pekerja rentan mengacu pada publikasi KILM-ILO, yaitu penduduk bekerja dengan status dalam pekerjaan utama adalah berusaha sendiri, pekerja bebas baik di pertanian dan nonpertanian, serta pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar.

BPS memaparkan pada Agustus 2014, proporsi penduduk bekerja yang tergolong "pekerja rentan/*vulnerable employment*" di Provinsi Jawa Barat mencapai 54,01%, yang berarti dari 100 orang pekerja yang termasuk kategori pekerja rentan sekitar 54 orang. Pekerja rentan adalah penduduk bekerja yang status pekerjaannya berusaha sendiri, pekerja bebas, dan pekerja keluarga. Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, proporsi pekerja rentan perempuan (sebesar 57,43%) lebih tinggi dibandingkan pekerja rentan laki-laki yang sebesar 52,32%. Angka

tersebut dapat diartikan bahwa dari 100 orang pekerja laki-laki, yang termasuk kategori “pekerja rentan” sekitar 57 orang, begitu juga dalam 100 orang pekerja perempuan, 52 orang diantaranya tergolong ke dalam kategori “pekerja rentan”.

Proporsi “pekerja rentan” menurut Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat tidak mengalami perubahan yang berarti. Pada keadaan Agustus 2014, yang tertinggi adalah Kabupaten Indramayu (78,97%), disusul oleh Kabupaten Tasikmalaya (78,29%) dan Kabupaten Ciamis (73,90%). Sementara itu proporsi pekerja rentan yang terendah adalah Kota Bekasi (20,59%), kemudian posisi kedua ditempati Kota Cimahi (28,09%) dan urutan ketiga ditempati oleh Kota Bandung (29,10%).

Tabel 6.8.
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja dan Status Pekerjaan Utama Provinsi Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota Periode Agustus 2013 s.d. Agustus 2014 (%)

No.	Kab/Kota	Pekerja Bebas		Pekerja Keluarga		Pekerja Rentan	
		Agus-2013	Agus-2014	Agus-2013	Agus-2014	Agus-2013	Agus-2014
1	Kab Indramayu	31.38	28.03	7.82	8.91	77.33	78.97
2	Kab Tasikmalaya	18.13	17.46	15.99	16.11	75.48	78.29
3	Kab Ciamis	16.51	14.94	17.60	18.66	72.95	73.90
4	Kab Majalengka	17.85	13.45	15.81	17.19	73.34	73.38
5	Kab Cirebon	27.71	24.02	9.03	8.18	76.42	72.56
6	Kab Garut	20.89	18.87	12.27	11.30	75.97	72.11
7	Kab Kuningan	16.03	17.17	16.48	15.43	71.70	71.62
8	Kab Sukabumi	14.64	17.04	11.63	11.29	64.89	71.03
9	Kab Cianjur	21.32	18.21	13.13	13.61	73.30	69.91
10	Kab Subang	23.87	25.14	9.29	8.51	69.02	68.80
11	Kab Sumedang	16.04	15.17	14.33	12.89	63.83	62.57
12	Kab Purwakarta	15.59	22.56	13.12	8.51	55.73	60.98
13	Kab Karawang	18.12	16.00	8.11	6.00	57.58	56.39
14	Jawa Barat	14.89	14.18	8.48	8.10	53.79	54.01
15	Kab Bandung Barat	22.81	24.72	7.66	2.95	54.40	49.68
16	Kota Banjar	7.18	8.74	7.82	6.89	51.26	49.26
17	Kab Bogor	14.23	12.18	6.32	6.70	48.27	48.79
18	Kota Tasikmalaya	24.03	17.81	7.45	4.41	53.20	47.86

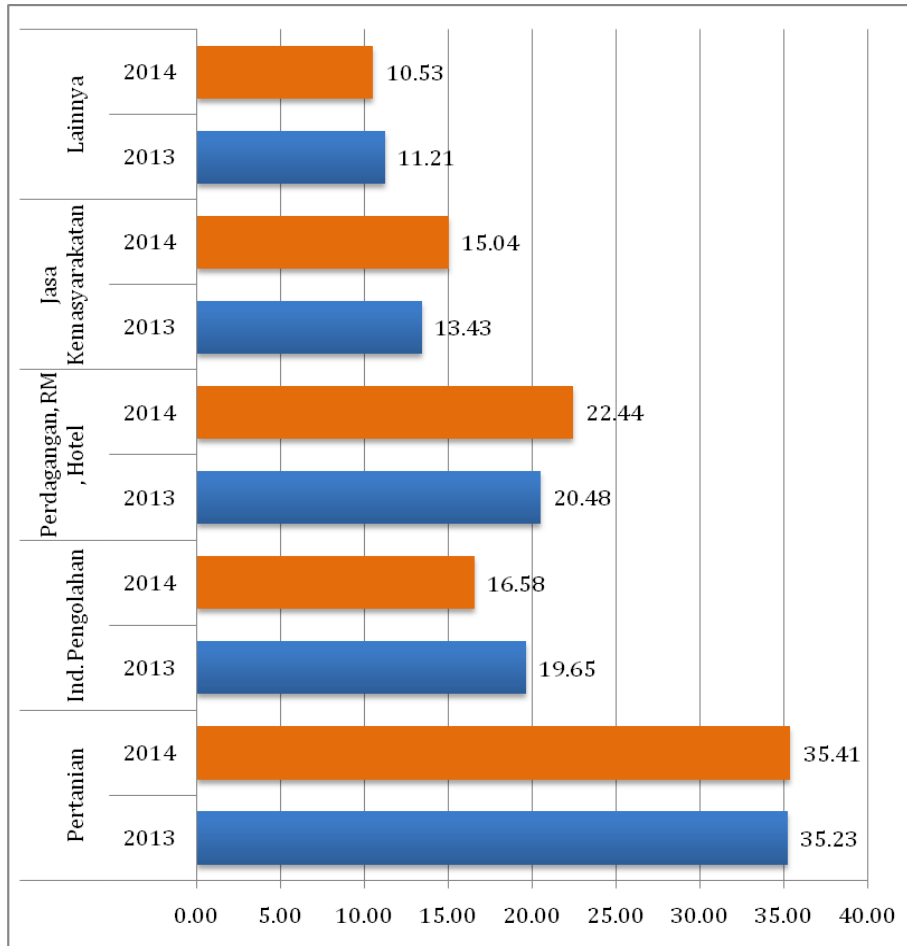
No.	Kab/Kota	Pekerja Bebas		Pekerja Keluarga		Pekerja Rentan	
		Agus-2013	Agus-2014	Agus-2013	Agus-2014	Agus-2013	Agus-2014
19	Kab Bandung	16.55	16.32	5.46	4.55	44.45	45.60
20	Kota Cirebon	6.59	6.89	4.73	3.07	41.50	41.50
21	Kota Sukabumi	8.12	6.65	6.23	7.33	42.99	39.42
22	Kab Bekasi	5.45	5.51	2.78	2.53	33.08	37.48
23	Kota Bogor	1.97	5.33	3.53	3.43	33.24	32.94
24	Kota Depok	5.00	3.61	4.60	6.10	30.31	31.69
25	Kota Bandung	2.89	3.32	4.29	4.74	29.32	29.10
26	Kota Cimahi	4.40	7.81	4.38	3.06	27.84	28.09
27	Kota Bekasi	2.26	4.13	1.86	2.41	18.89	20.59

Sumber : Indikator pasar Tenaga Kerja Jawa Barat, BPS, 2014

Informasi sektoral berguna untuk mengidentifikasi pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pembangunan. Dalam buku teks pembangunan ekonomi, tenaga kerja bergeser dari pertanian dan aktivitas tenaga kerja intensif lainnya ke sektor industri dan akhirnya menuju ke sektor jasa-jasa; dalam prosesnya, penduduk yang bekerja berpindah dari desa ke kota. Pada bagian ini sektor pekerjaan dibagi menjadi sektor (1) Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan, (2) Industri Pengolahan, (3) Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel, (4) Jasa Kemasyarakatan, dan (5) Lainnya (Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas & Air, Bangunan, Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi, Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan).

Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di Kabupaten Tasikmalaya dan status pekerjaan utama pada Agustus 2014 dengan persentase terbesar masih berada di sektor pertanian sebesar 35.41%. Jumlah ini relatif meningkat dibanding Agustus 2013 sebesar 35.23%. Terjadi peningkatan pada sektor perdagangan, rumah makan, dan hotel menjadi 22.44% pada Agustus 2014 dan jasa kemasyarakatan menjadi 15.04%. Sementara itu untuk ketiga sektor lainnya relatif mengalami penurunan.

Gambar. 6.4.
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja dan
Status Pekerjaan Utama (Sektoral) Kabupaten Tasikmalaya
Periode Agustus 2013 s.d. Agustus 2014 (%)

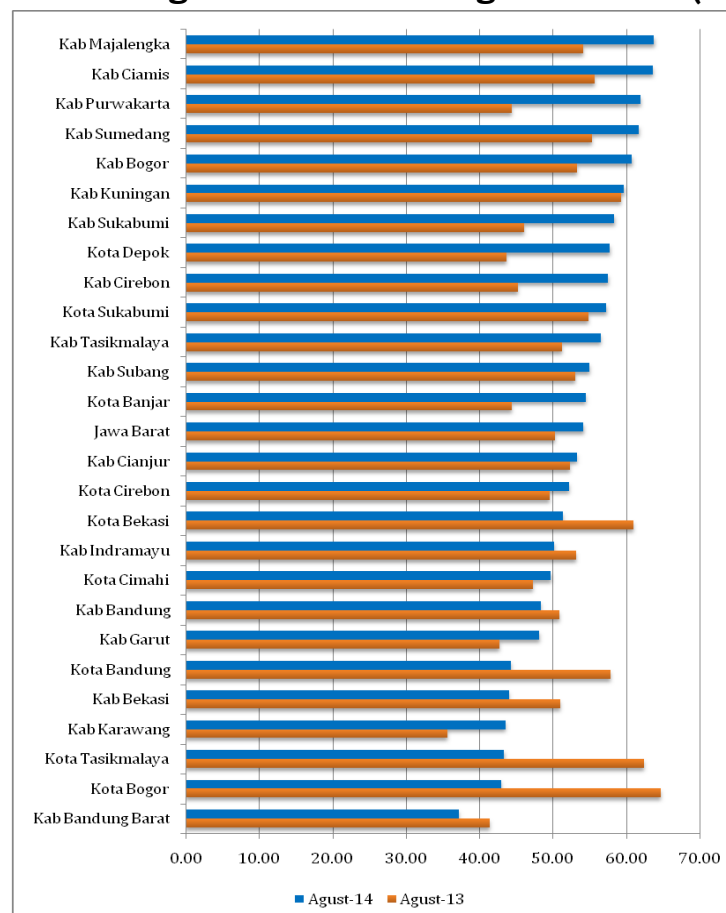


Sumber : Indikator pasar Tenaga Kerja Jawa Barat, BPS, 2014

Jumlah jam kerja berdampak pada pendapatan dan kesejahteraan penduduk. Pada pekerja berpendidikan rendah jumlah jam kerja sangat berpengaruh terhadap produktifitas dan pendapatannya. Pekerja dengan jam kerja yang sedikit kemungkinan besar akan memperoleh hasil yang sedikit pula sehingga diperkirakan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Walaupun untuk kelompok profesi tertentu jam kerja tidak terlalu berpengaruh namun jenis profesi seperti ini masih relatif sedikit di dalam struktur pekerja di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Barat. Indikator pekerja paruh waktu terfokus pada pekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari jam kerja normal (35 jam seminggu), sebagai proporsi dari total penduduk bekerja.

Pada Agustus 2014, Kabupaten/Kota dengan *share* perempuan pada pekerja paruh waktu tertinggi berturut-turut diduduki oleh Kabupaten Majalengka (63,57%), Kota Ciamis (63,57%), dan Kota Purwakarta (61,88%). *Share* perempuan pada pekerja paruh waktu terendah diduduki oleh Kabupaten Bandung Barat (37,16%), Kota Bogor (42,92%), dan Kota Tasikmalaya (43,37%). Pada periode yang sama, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Majalengka adalah kabupaten yang memiliki tingkat pekerja paruh waktu tertinggi, masing masing sebesar 31,58%, 28,16%, dan 25,45%. Sementara tiga posisi terendah untuk tingkat pekerja paruh waktu diduduki oleh Kota Bekasi (8,68%), Kota Bandung (9,55%), dan Kota Depok (9,98%).

Gambar 6.5
Share Perempuan Pada Pekerja Paruh Waktu
Provinsi Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota
Periode Agustus 2013 s.d. Agustus 2014 (%)



Sumber : Indikator pasar Tenaga Kerja Jawa Barat, BPS, 2014

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau biasanya disebut sebagai tingkat pengangguran menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja. Ini tidak boleh disalahartikan sebagai kesulitan ekonomi, meskipun korelasi antara tingkat pengangguran dan kemiskinan sering ada dan cenderung memiliki korelasi negatif.

Definisi baku penganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, dan bersedia untuk bekerja. Bersama dengan rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk (KILM 2), tingkat pengangguran menyediakan indikator situasi pasar tenaga kerja di negara-negara atau daerah yang mengumpulkan informasi tentang tenaga kerja. Secara spesifik, penganggur terbuka dalam Sakernas, terdiri atas: Mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan; Mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha; Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja. Tingkat pengangguran banyak digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan. Jika bekerja diambil sebagai situasi yang diinginkan bagi orang-orang dalam populasi yang secara ekonomi aktif (angkatan kerja), maka pengangguran menjadi situasi yang tidak diinginkan. Ada kalanya pengangguran jangka pendek menjadi suatu kondisi yang diinginkan dan diperlukan untuk memastikan penyesuaian (*adjustment*) fluktuasi ekonomi. Tingkat pengangguran pada kelompok tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan pendidikan berguna dalam mengidentifikasi kelompok penduduk bekerja dan sektor-sektor paling rentan terhadap pengangguran.

Pada Agustus 2014, posisi tiga kabupaten/kota dengan TPT tertinggi secara berturut-turut yaitu Kabupaten Cianjur sebesar 14,87%, disusul oleh Kabupaten Cirebon sebesar 13,32%, selanjutnya Kota Sukabumi sebesar 11,64%. Sedangkan pada kondisi Agustus 2013,

kabupaten/kota dengan TPT tertinggi diduduki oleh Kabupaten Cirebon sebesar 14,88%, Kabupaten Cianjur sebesar 14,18%, dan Kota Cimahi sebesar 11,43%. Sementara itu, kabupaten/kota dengan TPT terendah pada Agustus 2014 adalah Kabupaten Majalengka sebesar 4,47%, disusul Kabupaten Ciamis sebesar 4,92%, kemudian Kota Tasikmalaya sebesar 5,38%. Berbeda halnya pada Agustus 2013, kabupaten/kota dengan TPT terendah adalah Kabupaten Ciamis sebesar 5,85%, disusul Kabupaten Tasikmalaya sebesar 6,4%, kemudian Kabupaten Sumedang sebesar 6,41%.

Tabel 6.9
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota Periode Agustus 2013 s.d. Agustus 2014 (%)

No.	Kabupaten/Kota	Agust-13			Agust-14		
		Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Kab Majalengka	7.91	6.48	7.35	4.45	4.50	4.47
2	Kab Ciamis	6.76	4.22	5.85	5.75	3.66	4.92
3	Kota Tasikmalaya	6.76	6.11	6.52	4.52	7.14	5.38
4	Kab Subang	6.98	8.05	7.34	5.75	8.69	6.74
5	Kab Bekasi	6.16	9.61	7.17	5.32	10.62	6.79
6	Kab Kuningan	7.32	9.83	8.22	6.96	6.70	6.88
7	Kab Tasikmalaya	7.27	5.05	6.40	6.74	7.22	6.93
8	Kota Banjar	7.27	6.59	7.04	9.69	3.27	7.38
9	Kab Sumedang	6.64	5.97	6.41	7.05	8.24	7.51
10	Kab Bogor	7.72	8.20	7.87	8.52	5.70	7.65
11	Kab Garut	7.84	8.75	8.14	7.69	7.75	7.71
12	Kab Purwakarta	10.31	7.54	9.45	7.80	7.90	7.83
13	Kab Indramayu	9.04	10.76	9.63	8.15	7.72	8.01
14	Kota Bandung	11.00	10.92	10.97	8.72	6.94	8.05
15	Kab Sukabumi	9.24	12.83	10.38	8.74	6.78	8.09
16	Kab Bandung Barat	7.83	14.28	9.54	5.67	15.37	8.15
17	Kota Depok	8.32	6.35	7.69	7.88	9.55	8.44
18	Jawa Barat	8.73	10.04	9.16	8.07	9.21	8.45
19	Kab Bandung	9.65	11.07	10.12	7.65	10.07	8.48
20	Kota Bekasi	7.94	12.49	9.50	7.99	11.91	9.36
21	Kota Bogor	9.49	10.48	9.80	8.58	11.58	9.48
22	Kota Cimahi	14.28	5.94	11.43	9.93	9.07	9.62
23	Kota Cirebon	8.99	9.08	9.02	12.34	8.83	11.02
24	Kab Karawang	9.74	9.97	9.80	9.64	14.12	11.10
25	Kota Sukabumi	11.25	11.04	11.18	11.29	12.31	11.64
26	Kab Cirebon	11.79	21.63	14.88	11.75	16.94	13.32
27	Kab Cianjur	12.59	17.56	14.18	13.95	16.79	14.87

Sumber : BPS Prov. Jawa Barat, 2014

Persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan menunjukkan hubungan antara pencapaian pendidikan penduduk yang bekerja dan pengangguran yang memberikan gambaran mengenai perubahan dalam permintaan tenaga kerja. Informasi yang diberikan dapat memiliki implikasi penting bagi penduduk yang bekerja dan kebijakan pendidikan. Jika dikonfirmasi bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang rendah berada pada risiko yang lebih tinggi menjadi pengangguran, reaksi politik yang mungkin adalah meningkatkan tingkat pendidikan mereka atau untuk menciptakan lebih banyak pekerjaan dengan keterampilan rendah (*low skilled job*) di dalam negeri. Cara lainnya, *share* pengangguran yang lebih tinggi di kalangan orang-orang dengan pendidikan tinggi bisa menunjukkan kurangnya pekerjaan teknis yang profesional dan tingkat tinggi.

Kabupaten Tasikmalaya terjadi penurunan TPT kelompok pendidikan dasar kebawah pada Agustus 2014 menjadi 24,77% dibanding Agustus 2013 sebesar 39,20%. Demikian halnya dengan kelompok pendidikan tinggi dari 1,22% pada Agustus 2013 menjadi 0,00% pada Agustus 2014. Hal berbeda ditunjukkan pada kelompok pendidikan menengah yang mengalami lonjakan signifikan dari 59,58% pada Agustus 2013 menjadi 75,23% pada Agustus 2014. Melihat komposisi penganggur berdasarkan tingkat pendidikan memberikan gambaran mengenai tenaga kerja yang tersedia yang tidak terserap, berdasarkan tingkat keahlian mereka. Berdasarkan data Sakernas Agustus 2013 dan Agustus 2014, penganggur terbanyak adalah penganggur dengan pendidikan sekolah menengah. %tase penganggur dengan pendidikan sekolah menengah diperkirakan 70,16% meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang proporsinya sebesar 61,92%.

6.1.6. Infrastruktur Jalan

Perhubungan darat merupakan prasarana pengangkutan yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan

memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Di samping itu perhubungan darat merupakan salah satu sektor yang cukup besar peranannya karena kontribusinya untuk menembus isolasi suatu daerah untuk pemerataan pembangunan seluruh daerah. Di Kabupaten Tasikmalaya peranan perhubungan darat sangat dominan terutama untuk menyalurkan produk pertanian berbagai kecamatan sehingga sangat dibutuhkan dalam melayani kebutuhan masyarakat terutama menggerakkan perekonomian di pedesaan.

BPS Kabupaten Tasikmalaya memaparkan bahwa jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2013 sebanyak 12.258 unit, terdiri dari kendaraan umum sebanyak 4.187 dan kendaraan bukan umum sebanyak 8.071 unit. Kondisi perkembangan jumlah kendaraan di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2013 tersebut bila dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang terdaftar pada tahun sebelumnya terjadi peningkatan sebesar 102,65%. Tabel 6.10 menunjukkan sepanjang tahun 2011 sampai 2013 terlaksana perbaikan kondisi jalan negara, dimana panjang jalan kondisi baik yang hanya 8.993 Km pada tahun 2010 menjadi 20.95% pada tahun 2013 atau seluruhnya sudah dalam kondisi baik. Demikian halnya dengan kondisi jalan provinsi, meskipun terjadi penurunan panjang jalan, akan tetapi kondisi panjang menunjukkan perbaikan.

Tabel 6.10.
Panjang Jalan (Km) Negara dan Provinsi dan
Kondisi di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2009 S/D 2013

No.	Kondisi/Tingkat Kewenangan	2009	2010	2011	2012	2013
A.	Jalan Negara	28.15	28.15	20.95	20.95	20.95
1	Baik	8.993	8.993	20.95	20.95	20.95
2	Sedang	19.157	19.157	-	-	-
3	Rusak	-	-	-	-	-
4	Rusak Berat	-	-	-	-	-
B.	Jalan Propinsi	160.15	161.647	119.52	119.52	119.52
1	Baik	48.858	50.355	36.14	32.842	32.842
2	Sedang	76.557	76.557	70.502	81.953	81.953

No.	Kondisi/Tingkat Kewenangan	2009	2010	2011	2012	2013
3	Rusak	34.735	34.735	12.878	4725	4725
4	Rusak Berat	-	-	-	-	-

6.2. Arah Pembangunan Kewilayahan

Tantangan utama dalam pembangunan kewilayahan untuk pemerataan pembangunan wilayah adalah mengurangi kesenjangan antarwilayah dan tantangan lainnya adalah membangun pusat-pusat pertumbuhan (industry) untuk meningkatkan nilai tambah sector unggulan wilayah yang ada di Provinsi Jawa Barat yang didukung dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana infrastruktur dasar dan pendukung.

Kualitas sumberdaya manusia juga perlu ditingkatkan melalui pemenuhan kesehatan dan pendidikan dasar serta peningkatan keterampilan. Selain itu juga diperlukan peningkatan kapasitas dan kualitas institusi di daerah yang ditujukan untuk mendukung dan mendorong investasi di daerah. Peningkatan konektivitas interwilayah dan antarwilayah sangat diperlukan dengan pertimbangan kondisi geografis di Provinsi Jawa Barat antar wilayah mempunyai keragaman yang berbeda masing-masing wilayah untuk mendorong distribusi barang dan jasa serta transportasi di Provinsi Jawa Barat

Untuk melaksanakan pembangunan kewilayahan di Provinsi Jawa Barat merencanakan program prioritas 2013-2018 yaitu dengan merencanakan program tematik kewilayahan, dalam menunjang pembangunan kewilayahan Gubernur Jawa Barat menerbitkan Kepgub Nomor 650/Kep.1655-Bappeda/2014, tentang koordinasi Implementasi Tematik Kewilayahan yang menetapkan fungsi BKPP (Badan Koordinasi yang terbagi menjadi empat WKPP yaitu WKPP I (Wilayah Bogor), WKPP II (Wilayah Purwakarta), WKPP III (Wilayah Cirebon) dan WKPP IV (Wilayah Priangan).

Penyelenggaraan pembangunan di Jawa Barat menggunakan lima prinsip dasar dalam penyelenggaraan pembangunan yaitu (1) Melanjutkan, (2) Menuntaskan, (3) Memberi dukungan, (4) Reposisi dan

(5) Reorientasi, berkenaan dengan hal tersebut guna memberikan dukungan kepada upaya pemberdayaan dan peran serta masyarakat, meningkatkan daya saing daerah, serta potensi keanekaragaman daerah maka salah satu pendekatan yang digunakan dalam pembangunan adalah pembangunan berdasarkan tematik kewilayahan, adapun tematik kewilayahan (wilayah priangan) yaitu :

1. Mengembangkan Kawasan Pendidikan Tinggi dan Riset Terpadu di Jatinangor;
2. Mengembangkan klaster unggas, perikanan budidaya air tawar dan tangkap, serta ternak sapi perah, sapi potong, domba garut, kambing, dan jejaringnya serta pengembangan sentra produksi pakan ternak;
3. Mengembangkan produksi tanaman industri (kopi, teh, kakao, karet, astiri) dan hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias) yang berorientasi ekspor;
4. Mengembangkan jasa perdagangan, industri kreatif dan pariwisata;
5. Mengembangkan Metropolitan Bandung Raya, pusat pertumbuhan baru (growth center) Pengendaraan dan Rancabuaya).

Pembangunan kewilayahan di Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan potensi yang ada yaitu mengembangkan klaster unggas, perikanan budidaya air tawar dan tangkap, serta ternak sapi potong dan kambing, juga mengembangkan bahan baku pakan untuk ternak (jagung). Selain pembangunan yang telah ditetapkan sesuai dengan pembangunan tematik kewilayahan Provinsi Jawa Barat maka perlu pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur diantaranya pembangunan jalan dan jembatan untuk mendukung kelancaran mobilisasi barang dan jasa serta transportasi diantaranya pembangunan jembatan antar perbatasan dengan kabupaten/kota yaitu :

1. Pembangunan Jalan dan jembatan Benteng – Manonjaya (menghubungkan Kecamatan Manonjaya Kab. Tasikmalaya dengan Benteng Kabupaten Ciamis);

2. Pembangunan Jalan dan Jembatan Singkup – Manonjaya (menghubungkan Kec. Manonjaya Kab. Tasikmalaya dengan Singkup Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya);
3. Pembangunan Jalan dan Jembatan Sukaresik – Panumbangan (menghubungkan Kec Sukaresik Kab Tasikmalaya dengan Kecamatan Panumbangan Kab. Ciamis)
4. Pembangunan Jalan dan Jembatan Pagerageung-Panumbangan (menghubungkan kec. Pagerageung dengan Panumbangan Kab. Ciamis)